

---

# Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial

---

## Tertundanya Pembentukan Provinsi Tapanuli dalam Tinjauan Antropologis dan Historis

Armansyah Matondang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

---

### Abstrak

Tapanuli di masa pemerintahan kolonial Belanda adalah sebuah keresidenan yaitu daerah setingkat provinsi di masa kini. Namun setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Tapanuli tidak mendapatkan statusnya sebagai sebuah daerah setingkat provinsi. Tapanuli secara geografis terbagi dua, yaitu Selatan yang merupakan daerah terbuka dan Utara adalah wilayah terisolir. Dihuni berbagai *puak* yang dikenal sebagai bangsa Batak di masa kolonial dan kini etnis Batak dan dibagi ke dalam enam sub etnik Batak. Namun persoalan penamaan Batak tidak disepakati oleh berbagai sub etnik Batak yang ada, misalnya orang Karo yang tidak mau disebut sebagai Batak. Bahkan orang Mandailing paling keras menolak penyematan kata Batak Mandailing, dan tegas mengatakan Mandailing bukan Batak. Penolakan tersebut, kemudian diketahui telah menimbulkan konflik identitas dan memberikan dampak kepada kehidupan sosial-budaya dan politik di Tapanuli, semenjak masa kolonial hingga Indonesia merdeka. Menariknya, konflik identitas ini pecah bermula di Tanah Rantau (Deli) dan kemudian muncul kekhasan yang mewakili kedua wilayah itu, yaitu Selatan adalah Islam dan Utara adalah Kristen. Terlihat seakan ada rivalitas antara dua wilayah tersebut, dimana kondisi itu tidak terlepas dari keberadaan kolonialisme di Tapanuli. Pembentukan provinsi Tapanuli yang tertunda tidak dapat dilepaskan dari dampak sosial-budaya, dan politik semenjak era kolonial bahkan sebelum kolonial.

**Kata Kunci :** Pembentukan; Provinsi Tapanuli; Antropologis; Historis

### Abstract

*Tapanuli in the Dutch colonial administration is a provincial-level regions, namely residency in the present. But after Indonesia gained independence from Dutch colonial rule, the Tapanuli region is not getting its status as a provincial-level regions. Tapanuli is geographically divided into two, namely the South is an open area and the North is isolated areas. Inhabited kinds puak as known as Batak peoples in the colonial and present ethnic Batak and is divided into six sub-ethnic Batak. But Batak naming issues not agreed upon by the various sub-ethnic Batak that exist, such as a person who does not want to Karo Batak called. Even the most adamant embedding Mandailing Batak Mandailing word, and expressly say Mandailing not Batak. The refusal, later known to have been a conflict of identity and the impact on the socio-cultural life and politics in Tapanuli, since the colonial period until Indonesia's independence. Interestingly, this identity conflict broke out began in the Overseas Land (Deli) and then came the peculiarities that represent the two regions, namely North is Kristen and South is Islam. Looking as if no rivalry between the two regions, where conditions were inseparable from the existence of colonialism in Tapanuli. Pending the formation of Tapanuli province can not be separated from the socio-cultural, and political since the colonial even before colonial era.*

**Keywords:** Formation; Tapanuli Province; Anthropological; Historical

---

\*Corresponding author:

E-mail: armatondang@gmail.com

## PENDAHULUAN

Azis Angkat, orang Pakpak ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD – SU) meninggal dunia. Ia (Azis Angkat) menghembuskan nafas terakhirnya pada hari dimana ia menghadapi para peserta aksi pendukung pemekaran provinsi Tapanuli dari provinsi induknya yakni provinsi Sumatera Utara. Sekali lagi meninggal dunia di salah satu rumah sakit di kota Medan setelah ia menghadapi demonstrasi pendukung Protap yang berakhir dengan kacau *chaos* dan pada akhirnya berujung ke ranah hukum. Kekacauan yang terjadi di lingkungan kantor DPRD SU itu sangat mengejutkan, tidak seperti aksi unjuk rasa lainnya yang jikalau berakhir dengan bentrokan biasanya hanya berlangsung di pekarangan kantor tersebut saja. tapi kali ini tidak, peserta aksi memiliki militansi tinggi dan benturan tidak hanya terjadi di areal pekarangan saja, tetapi peserta aksi mampu masuk menerobos masuk keruangan sidang DPRD SU tersebut, bahkan pada saat para legislator provinsi Sumatera Utara itu sedang bersidang. Disitulah malapetaka bermula, kematian sang ketua DPRD SU. Diketahui pula peserta aksi atau demonstrasi yang meminta pemekaran mayoritas adalah orang – orang Batak di wilayah yang dahulunya merupakan kabupaten Tapanuli Utara. Mereka dikenali sebagai orang Toba, *par utara* (orang Utara) dalam istilah di Mandailing.

Seperti diketahui, provinsi Sumatera Utara adalah wilayah pertama di Indonesia yang berhasil melakukan pemekaran wilayahnya pasca reformasi bergulir di Indonesia. Kejadian ini (pemekaran) terlihat sebagai suatu pemanfaatan momentum yang tepat, sebagai mana diketahui Indonesia telah berada dalam kekuasaan rezim Orde Baru selama 32 tahun. Sebagaimana dikatakan oleh Schmitter dan O'Donnel (1986:6) “perilaku suatu rezim otoriter dapat diumpamakan seperti gelang karet ketika stabilitas politik dalam keadaan mantap ikatan terhadap nilai-nilai demokrasi akan dikencangkan namun akan diendurkan ketika stabilitas rezim terancam. Itulah yang dimaksudkan sebagai

pemanfaatan momentum dengan tepat, atau dikarenakan ketakutan rezim akan terhadap tekanan yang ada”. Atau dapat juga dikatakan betapa pentingnya posisi Tapanuli dalam menjaga integritas nasional negara bangsa bangsa yang kini bersatu menamakan diri sebagai Indonesia?

Otonomi daerah adalah implementasi berubahnya kebijakan pemerintah yg sentralistik ke desentralisasi merupakan landasan bagi pemekaran wilayah baik di tingkat kabupaten maupun kota dan provinsi. Menariknya pemekaran pertama di Indonesia pasca reformasi itu bermula di provinsi Sumatera Utara, dimana wilayah tingkat II yang dimaksud yang mengawali pemekaran di era reformasi itu keduanya berada di wilayah Tapanuli, satu berada di Selatan Tapanuli dan satu di bagian Utara Tapanuli. Yang berada di wilayah Selatan Tapanuli itu adalah wilayah Mandailing dan Natal ia dimekarkan dari kabupaten Tapanuli Selatan dan karena itulah kabupaten termuda di Indonesia itu disebut sebagai kabupaten Mandailing Natal dan disingkat dengan Madina. Terkesan sedikit mirip dengan Madinah, tapi entah karena kebetulankah wilayah itu memang dijuluki sebagai serambi Makkahnya provinsi Sumatera Utara dikarenakan sifat religius penduduknya dalam menjalankan ajaran Islam, dan umum disebutkan orang luar sebagai pemeluk Islam yang fanatik.

Sedangkan yang di bagian Utara Tapanuli itu adalah wilayah Toba dan Samosir, karena itulah wilayah hasil pemekaran dari kabupaten Tapanuli Utara itu dinamai kabupaten Toba Samosir dan disingkat dengan Tobasa. Begitu pula dengan penduduk (saudara) mereka di Utara itu, entah karena suatu ketepatan jugakah dikenali sebagai orang-orang yang mengimani ajaran Kristus dengan taat, dan dapat juga dikatakan sebagai pemeluk Kristen yang fanatik dibandingkan dengan pemeluk Kristen lainnya di Sumatera Utara. Untuk soal itu menarik untuk memaknai ungkapan mereka sebagaimana didapati dalam buku Pedersen, *Batak Blood Protestant Soul*. Mereka (orang Batak) mengatakan “kehadiran agama Kristen

telah menjadikan mereka menjadi orang Batak yang lebih baik". Setidaknya begitu dalam anggapan orang sebelah Selatan jauh (*southern faar*) Tapanuli atau orang yang menyebut dirinya sebagai orang Mandailing mengatakan *Toba karisten lobi fanatik dei* (orang Kristen Toba lebih fanatik). Ya, orang Mandailing tanpa kata awal Batak mengatakan itu. Terlihat ada perbedaan tegas di kedua wilayah Tapanuli itu, Selatan adalah Islam dan Utara adalah Kristen, itulah unsur penting yang mempengaruhi kedua budaya di wilayah Tapanuli.

Kembali ke soal pemekaran di Sumatera Utara, setelah kedua wilayah itu memekarkan diri maka secara berantai wilayah-wilayah lain di Sumatera Utara mengikut pula menuntut pemekaran. Wilayah itu misalnya seperti Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Dairi, Nias. Bahkan hingga kini wilayah Simalungun dan Langkat masih dilingkupi penuntutan pemekaran. Menariknya soal pemekaran di Sumatera Utara wilayah yang juga paling getol melakukan pemekaran adalah kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Dan berlangsungnya pemekaran disana relatif lebih damai dan cepat, setidaknya tidak seperti proses kelahiran kabupaten Batubara dari kabupaten Asahan yang berlarut, memakan waktu lama dan berdarah serta sarat konflik. Kabupaten Tapanuli Selatan kini telah menjadi lima daerah setingkat kabupaten dan kota yakni kabupaten Mandailing Natal, kabupaten Padang Lawas, kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padangsidempuan dan kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan Tapanuli Utara telah menjadi empat kabupaten, yakni kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, kabupaten Humbang hasundutan dan Tapanuli Utara. Kondisi ini secara tersirat apakah menandakan adanya suatu kompetisi atau rivalitas antara Selatan Tapanuli dan Utara Tapanuli?

Kemudian mengapa pula pemekaran di tingkat provinsi itu berlangsung sulit, panjang dan berlarut, menimbulkan pro dan kontra tidak semulus pemekaran di tingkat kabupaten. Khususnya seperti pemekaran daerah-daerah di tingkat kabupaten/kota yang sudah berlangsung di wilayah Tapanuli sendiri. Untuk

persoalan pemekaran provinsi Tapanuli ada beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan dan terlihat diabaikan oleh pemrakarsa dan panitia (apapun sebutannya) pembentukannya. Faktor faktor tersebut adalah sebagaimana berikut. **Pertama**, berlangsungnya penolakan yang masif dari penduduk di bagian Selatan Tapanuli, walaupun penolakan tersebut tidak dilakukan secara eksplisit dalam bentuk gerakan jalanan yang vulgar. Diketahui juga tidak ada antusiasme orang-orang di Selatan untuk memperjuangkan pemekaran untuk menghidupkan kembali wilayah ex Keresidenan Tapanuli menjadi provinsi Tapanuli. Bahkan isu atau gerakan pembentukan provinsi Tapanuli cenderung disikapi acuh tak acuh atau diabaikan saja. **Kedua**, isu percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi yang ditawarkan tidak dapat menjadi diterima menjadi isu bersama. Dikarenakan dengan bercermin kepada kondisi berbagai wilayah hasil pemekaran yang ada isu yang ditawarkan tersebut menjadi tidak relevan. **Ketiga**, Siborongborong sebagai Ibukota provinsi baru tersebut tidak dapat diterima dan dianggap sebagai sebuah arogansi dan tidak memiliki akar historis yang kuat bagi wilayah Tapanuli secara keseluruhan. **Keempat**, gerakan pembentukan provinsi Tapanuli telah merangsang berbagai wilayah di Sumatera Utara untuk membentuk gerakan pemekaran provinsi yang lain seperti, provinsi Asahan – Labuhan Batu (Aslab), provinsi Nias dan yang mengejutkan wilayah Selatan Tapanuli hadir dengan nama yang lebih nasionalis yaitu Sumatera Tenggara (Sumtra).

Lantas dengan uraian faktor-faktor di atas muncullah bagi kita pertanyaan-pertanyaan, seberapa bermaknakah nama Tapanuli dan urgensi kelahirannya sebagai wilayah setingkat provinsi kembali bagi keseluruhan penduduk di wilayah tersebut? Kemudian, apa sebenarnya yang menyebabkan tidak adanya kesatuan pandangan dan sikap pada penduduknya (*south and north Tapanuli region*) dalam upaya memekarkan provinsi Sumatera Utara dan menghidupkan kembali ex Kresidenan Tapanuli menjadi Propinsi Tapanuli

dimasa kini? lalu kemudian masih adakah harapan untuk lahirnya provinsi Tapanuli? Dengan bersandar pada paparan di atas berikut akan dijabarkan aspek-aspek antropologis dan historis yang terabaikan dari para pemrakarsanya dimana semestinya aspek-aspek tersebut seharusnya mesti mendapat perhatian penuh dari semua pihak yang berkepentingan untuk kehadiran dan lahirnya Provinsi Tapanuli kembali. Dikarenakan dengan mengabaikan faktor-faktor tersebut sama saja seperti suatu kondisi dimana seseorang menolak suatu kenyataan yang terang benderang seterang matahari bersinar disiang hari.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tinjauan sejarah, tapanuli adalah sebuah kata yang akan memberikan kesan berbeda bagi tiap orang yang mendengarnya, bagi para ilmuan ia (Tapanuli) adalah suatu lapangan yang kaya untuk melakukan penelitian, baik bagi ilmu-ilmu sosial maupun bagi ilmu eksakta. Seperti kita ketahui di wilayah Keresidenan itulah terdapat nama-nama seperti berikut; Pansur-Barus, Sibolga, Natal, Tano Bato, Musthafawiyah-Purba Baru, Kotanopan, Pakantan, Muarasipongi, kompleks permandian di tepi sungai Barumon dan Panai, Parausorat, Lembah Silindung, dataran tinggi Humbang tempat pohon kapur Barus, Bakkara tempat kedudukan Sisingamangaraja dinasti, *Parmalim* (agama malim), invasi gerakan Islam puritan kaum paderi, Sigumpar, RMG dengan I.L. Nommensen, Huria Batak keristen Protestan (HKBP), dan akhirnya danau Toba. Semua tempat di atas ada di Tapanuli, dan bagi para akademisi dan ilmuwan diseluruh dunia tempat-tempat itu adalah sarat makna dan diketahui keberadaannya. Sekali lagi itulah Tapanuli.

Nama Tapanuli sendiri diambil dari suatu tempat pancuran, pemandian (*Tapian*) yang indah (*na uli*) di wilayah Tapanuli Tengah kini, tempat itu adalah pemandian bagi para pedagang dari dataran tinggi Toba yang akan turun ke pantai atau pesisir. Dari padanan kata itulah nama Tapanuli bermula, dan kemudian

dari pemandian yang indah itu pula suatu tempat di pesisir itu kelak akan menjadi Ibukota dari Keresidenan Tapanuli tersebut yakni Sibolga (Castles:2001:Xli). Tapanuli adalah tempat yang terkepung secara budaya, dari Timur ia berhadapan dengan kebudayaan Melayu, di Selatan ia bertemu dengan kebudayaan Minangkabau, dan di Barat - Utara ia bertetangga dengan Aceh. Dimana keseluruhan kebudayaan yang disebutkan itu adalah wilayah yang memeluk agama Islam (Causey:2003:87).

Selain itu tanah yang disebutkan sebagai Tapanuli itu dihuni oleh bermacam-macam etnik yang satu dengan lainnya memiliki kemiripan budaya. Kemudian ada suatu hal yang penting, yakni soal agama (*religion*), wilayah Tapanuli terbelah menjadi dua wilayah sebelah Utara mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen sedangkan di Selatan penduduk dapat dikatakan hampir keseluruhan memeluk Islam, kecuali disuatu desa kecil di wilayah Pakantan dimana orang Mandailing asli memeluk agama Kristen, dan jumlahnya sangat sedikit (Parlindungan:2011:78).

Penting untuk diketengahkan disini, pada era kolonial tempat ini (Keresidenan Tapanuli) adalah tempat yang sangat dinamis bagi kaum pergerakan nasional Indonesia, dan dapat dikatakan setara dengan Jawa Timur sebagai wilayah pergerakan nasional paling dinamis untuk kemerdekaan Indonesia (Castles:2001:173). Dikarenakan keadaan yang sangat dinamis itu didapati pulalah dinamika dengan eskalasi yang tinggi dan panas dalam menyikapi persoalan -persoalan internal di Keresidenan Tapanuli. Dimana dinamika itu didapati telah berubah dan berujung menjadi konflik antara penduduk di bagian Selatan dan di Utara (Castles:2001:95). Bahkan tidak sampai disitu saja, konflik orang-orang yang berasal dari Tapanuli itu juga berlanjut dan pernah berlangsung di tanah rantau sebagaimana di Deli, suatu konflik identitas yang pahit bagi orang Mandailing dan Batak (Pelly:1995:66-70). Kejadian itu sepertinya relevan dengan yang dikatakan oleh Reid (2011:46), "orang-orang di dataran tinggi

Sumatera benar hidup disatu pulau tetapi mereka tidak pernah bersatu, satu dengan yang lainnya nyaris tidak pernah berinteraksi, mereka hanya diikat oleh satu persamaan yakni budaya mereka sama-sama berbasis pada pertanian padi basah". Dan Reid (2011:46-47) masih menambahkan, mereka orang-orang dataran tinggi itu berjiwa egaliter, merdeka dan bermental wirausaha (*entrepreneurship*), bagi mereka pemimpin hanya menduduki posisi tinggi sebenang (Reid:2011:1. Dikarenakan itu pulalah kelihatannya penduduk didataran tinggi Toba di Utara dan di dataran Tinggi Mandailing di Selatan tak pernah merasa senasib dan sejiwa.

Dari sisi antropologis, ada beberapa hal yang menarik apabila ditinjau dari kolonialisme, perbedaan agama, mitologi dan rivalitas selatan dan utara dari daerah yang disebut dengan Tapanuli. Agresifitas identitas, atau lebih tepat rasa atau ego superioritas dari penduduk Tapanuli di bagian Utara terutama terhadap orang-orang Tapanuli asli (*indigeneous*) baik dari wilayah lain di luar danau toba (*Lake Toba region*) atau disepertarnya adalah suatu persoalan tersendiri. Hal ini dapat dijelaskan dari kejadian-kejadian yang berlaku sehari-hari ketika ada perkenalan atau ramah-tamah yang berlangsung antara sesama orang-orang bermarga dari Tapanuli semiasal antara orang Toba dan orang Mandailing, atau antara orang Toba dan Simalungun. Orang-orang dari Utara Tapanuli jikalau berkenalan dengan orang yang belum dikenal pertama sekali akan mendefinisikan orang yang belum dikenal itu sebagai *alak hita* (orang kita) atau bukan (Ihromi:2001:167). Setelah diketahui orang tersebut adalah sebangsa (Batak) dalam anggapan orang bermarga dari UtaraTapanuli tersebut maka pertanyaan selanjutnya adalah, *aha margamu* (apa margamu) kepada orang tersebut.

Kemudian ketika identitas marga dari orang itu diketahuinya maka klaim atau vonis identitas sebagai Batak terhadap orang tersebut akan jatuh. Lalu kemudian posisi orang tersebut akan diberitahukan atau ditegaskan kepada orang tersebut ketika ia tidak mengetahui

keberadaannya dalam struktur kekerabatan orang Batak. Dalam struktur adat dan kekerabatan orang Batak yang dikenal sebagai *dalihan na tolu (exogamic Three Clans Intermarriage)* atau (*tungku nan tiga*) ketiga unsur dalam dalihan na tolu itu sendiri adalah boru (*wife takers*), hula-hula (*wife givers*) dan *dongan sabutuha (brother in one clan* (Gultom, Parlidungan:2010: 65,2008:78). Orang seperti itu biasa disebut *dalle* oleh orang Toba. Setelah penjelasan itu maka orang tersebut biasanya akan mendapatkan kursus singkat mengenai silsilah siraja Batak yang turun dari *Banua Ginjang* (dunia kayangan) di Puncak Pusuk Buhit dan merupakan asal mula manusia Batak dan ditegaskan bahwa seluruh marga-marga asli yang ada di Tapanuli keseluruhannya adalah bermula dari siraja Batak (Causey:85-86).

Menyikapi kejadian di atas bagi orang Tapanuli yang tidak tahu menahu atau tidak begitu perduli, atau tidak peduli sama sekali maka orang tersebut akan menerima identitas Batak tersebut bagi dirinya atau hanya bersikap pasif saja. Tetapi bagi orang yang menaruh kepedulian pada persoalan identitas kejadian itu dapat berujung pada pertengkaran, perdebatan yang pada akhirnya dapat menjadi konflik antar sesama orang Tapanuli. Keadaan inilah salah satu persoalan yang nyata ada di Tapanuli ketika tuntutan pemekaran sedang berlangsung. Bahkan kini keadaan itu tetap berlaku. Bahkan sebagaimana dituliskan oleh Castles (2001:3) pernyataan bahwa tanah Toba atau Utara Tapanuli merupakan jantung (the heart land) tanah Batak adalah sesuatu yang tidak begitu penting bagi orang-orang di Selatan namun menjadi sesuatu yang berarti di Utara untuk menopang rasa superioritas di Tapanuli.

Kondisi di atas jika ditilik dari perspektif primordial adalah tiadanya elemen intangible berupa ikatan emosional yang terbentuk dari pengalaman, keyakinan dan nilai-nilai bersama yang mengikat kebersamaan psikologis penduduk di Tapanuli bagian Selatan dan Utara (Tambunan:2004:4). Perihal di atas relevan pula dengan pernyataan Peter M. Leslie (2002:21), "persamaan nenek moyang

(meskipun bersifat dongengan), membagi kenangan sejarah dan membagi warisan kultural “. Keadaan sebagaimana diungkapkan Leslie di atas itulah yang tidak dimiliki dan tidak diakui terutama oleh penduduk di Selatan Tapanuli terutama di Mandailing. Ini terlihat dengan terjadinya konflik identitas di tanah rantau antara orang Mandailing dengan orang-orang Sipirok yang sama-sama menganut agama Islam di perantauan yaitu di Deli pada tahun 1922-1926, sedangkan percikan konflik identitas itu bermula pada tahun 1921 (Ihoetan:1926:8). Diketahui pada awalnya orang-orang Sipirok mengakui dirinya sebagai orang Mandailing tetapi seiring berjalannya waktu mereka menyatakan diri mereka sebagai bangsa Batak dan mengatakan bahwa orang Mandailing juga sebenarnya adalah berbangsa Batak (Ihoetan:1926:6). Konflik identitas yang disimbolisasi dengan tanah perkuburan bangsa Mandailing di Sei Mati di tanah rantau ini juga merupakan suatu luka yang mendalam bagi bangsa Mandailing dan bangsa Batak, dimana sedikit banyaknya masih diingat dan bukan mustahil masih diwarisi oleh keduanya.

Seperti telah dijabarkan upaya pembentukan provinsi Tapanuli dapat dikatakan nuansanya sangat beraroma Utara sentris, namun begitu perlu juga dipahami ketidak acuan di Selatan Tapanuli adalah berbeda keadaannya. Di Mandailing, orang mengabaikannya dikarenakan persoalan identitas kebangsaan atau suku (etnik) dimasa kini dan ditambah dengan Islam sebagai agama yang dianut berbeda dengan agama yang dianut para pengusungnya. Namun di Selatan tepatnya di luar Mandailing soal identitas etnik terlihat bukan menjadi faktor dominan penolakan, faktor dominasi Utara dan Islam adalah hal yang terlihat memiliki relevansi.

Persoalan Islam dan Kristen di Tapanuli tidak dapat dikesampingkan dari keberadaan campur tangan pemerintah kolonial Belanda di Tapanuli, suatu hal yang paling menyolok yang menggambarkan posisi kolonial terhadap perkembangan agama Islam dan Kristen di Tapanuli adalah penerapan kebijakan keberpihakan yang bijaksana yang dikenali

sebagai politik penyekatan wilayah (*wedge policy*) Tapanuli oleh pemerintah kolonial di Tapanuli yang bertujuan agar agama Kristen menjadi agama dari penduduk wilayah yang baru dikuasai itu, artinya agama Islam dilarang atau dalam bahasa yang lebih lunak dicegah berkembang di Utara Tapanuli (Castles:200:79). Dari semua itu wilayah yang paling menderita merasakan dampak sosio politik dari penerapan kebijakan tersebut adalah Sipirok dan Sarulla. Kondisi demikian itulah yang berlangsung di wilayah Sipirok dan Angkola yakni luka lama terkait hubungan Islam disatu sisi dan pemerintah kolonial, misi zending – RMG dan penduduk Utara Tapanuli yang memeluk agama Kristen. Artinya bagi wilayah Sipirok, Angkola, dan Padang Lawas Utara soal identitas etnik tidak menjadi faktor penting dalam memandang isu pembentukan provinsi Tapanuli tetapi soal kekuasaan, politik dan Islam adalah persoalannya. Tidak seperti di Mandailing dimana soal identitas etnik adalah menjadi sangat menonjol disamping Islam.

Di masa pemerintahan kolonial ada suatu peristiwa yang mengguncang Tapanuli yaitu persoalan pembentukan suatu dewan bagi Tapanuli, tujuan ini diajukan pemerintah kolonial untuk menguatkan identitas etnik atau kesukuan bagi wilayah-wilayah kekuasaannya di Hindia Belanda, dalam kata lain untuk membendung gerakan nasionalisme di Hindia. Selain itu juga bertujuan buat efisiensi pendanaan pemerintah terhadap publik. Persoalan yang mengguncang itu adalah soal nama dewan yang akan dibentuk tersebut, adalah *Batakraad* (dewan Batak) yang diajukan dan hampir seluruh wilayah di Tapanuli menerimanya kecuali di wilayah Mandailing dan Natal nama *Batakraad* ditolak keras. Kemudian usul nama *Tapanuliraad* juga kandas walaupun wilayah pesisir seperti Natal dan Sibolga-Tapanuli Tengah menerimanya walaupun nama *Batakraad* tetap diinginkan mayoritas penduduk.

Ujungnya giliran Tapanuli Utara pula yang menolak nama *Tapanuliraad* karena dianggap sebagai sebuah nama yang tidak memiliki akar identitas yang merujuk

kesiapapun di Tapanuli. Mengejutkannya lagi dari Mandailing diterima pesan andai satu dewan-Batakraad di Tapanuli dipaksakan maka Mandailing mengatakan lebih memilih bergabung ke Minangkabau (Castles:2001: 98-205). Terlihat persoalan secara terang benderang gagalnya pembentukan *Batakraad* adalah karena soal identitas etnik, Batak dan Mandailing, Kristen dan Islam adalah suatu persoalan yang ada dan nyata. Bahkan orang Mandailing mengatakan lebih jauh lagi sebenarnya persoalannya orang Mandailing semenjak dahulu sebelum Islam hadir dan mereka peluk tidak pernah ada hubungan dengan orang-orang bagian Tapanuli Utara, jadi ini bukan semata soal agama semata, tetapi soal identitas Batak yang tidak dapat mereka terima disematkan pada mereka (Castles:2001:98).

Seterusnya adalah rencana soal Ibukota dari provinsi Tapanuli nantinya ketika telah disahkan juga merupakan isu sensitif, namun mengejutkannya isu ini terlihat tidak begitu diperhitungkan dari aspek antropologis dan historis. Siborongborong adalah Ibukota dari provinsi Tapanuli andai provinsi Tapanuli berhasil diloloskan, pilihan ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi banyak pihak baik bagi orang-orang di Tapanuli sendiri maupun di Tapanuli. Pertanyaan ini muncul dikarenakan secara historis Ibukota keresidenan Tapanuli dahulu adalah Sibolga, dan secara antropologis Siborongborong terkesan dan dimaknai oleh wilayah-wilayah di ex keresidenan Tapanuli adalah sebagai sebuah arogansi dan tempat itu bukan representasi buat semuanya. Kemudian secara geografis juga tidak memiliki letak dan nilai strategis secara sosio politik dan ekonomi bagi keseluruhan wilayah Tapanuli. Sekali lagi Utara dipandang mengulangi sikap yang sama, menyederhanakan persoalan yang memiliki sensitifitas yang tinggi. Yaitu soal identitas.

## KESIMPULAN

Demikianlah aspek-aspek antropologis dan historis yang dimiliki oleh wilayah Tapanuli semenjak pra kolonialisme hingga masa kekuasaan kolonial Belanda. Kiranya faktor-faktor yang melingkupi wilayah itu secara

sosio-kultur masih relevan hingga kini, tetapi sayangnya faktor-faktor yang diuraikan diatas cenderung diabaikan oleh kelompok-kelompok strategisnya ketika mereka sedang menggerakkan suatu usaha yang dikatakan ingin memajukan dan membangun Tapanuli menjadi lebih baik dan beradap. Padahal sesuai dengan yang dikatakan oleh Evers (1990:xvii), "kelompok strategis secara khas, didaerah yang terbuka kesempatan untuk perolehan baru". Akibatnya adalah seperti suatu sikap yang kurang mengambil pelajaran dari kata pepatah, "Keledai saja tidak mau masuk lubang dua kali" atau relevan dengan ungkapan berikut sejarah terulang kembali dengan pelaku yang berbeda dan diwaktu yang berbeda tetapi dalam persoalan yang sama. Padahal semestinya andai aspek-aspek antropologis-historis ini tidak cenderung diabaikan tentu akan ada catatan baru tentang Tapanuli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Castles, L. 2001. Tapanuli-Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatra. KPG. Jakarta.
- Causey, A. 2006. Danau Toba Pertemuan Wisatawan dengan Batak Toba di Pasar Souvenir. BMP. Medan.
- Evers, H. D & Tilman S. 1990. Kelompok-Kelompok Strategis. Jakarta: Buku Obor.
- Gultom, I. 2010. Agama Malim di Tanah Batak. Bumi Jakarta: Aksara.
- Ihoetan, M. 1926. Riwayat Tanah Wakap Bangsa Mandailing di Sungai Mati Medan. Medan: Sjarikat Tapanoeli.
- Ihromi, T.O. 2006. Pokok Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Pelly, U. 1994. Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing. Jakarta: LP3ES.
- Parlindungan, M.O. 1997. Tuanku Rao. Yogyakarta: LkiS
- Reid, A. 2011. Menuju Sejarah Sumatera-Antara Indonesia dan Dunia. Jakarta: Buku Obor-KITLV.
- Tambunan. M.T.E. 2004. Nasionalisme - Etnik Kashmir dan Quebec. Semarang Timur: Intra Pustaka Utama.
- O'Donnel & Schmitter. 1986. Transitions from Authoritarian Rule. New York
- Zon, F. 2002. Gerakan Etnonasionalisme-Bubarnya Imperium Uni Soviet. Jakarta: Sinar Harapan.